

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata) dimana seluruh komponen bangsa, baik militer maupun non militer memiliki tanggungjawab mempertahankan setiap jengkal tanah air sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45 dengan isi melindungi setiap warga negara dan tanah air Indonesia (Wuryandari, 2014). Pada kepentingan nasional peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat, pemerintah mengupayakan pelaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan (Dewi, 2013). Bagi Indonesia, politik luar negeri tidak lain adalah bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional negara Indonesia. Wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah sebagai berikut (Policy et al., 2013):

1. Ikut serta dalam ASEAN Indonesia bukan hanya anggota ASEAN, akan tetapi juga sebagai pendiri. Sekjen pertama ASEAN dipercayakan kepada HR. Dharsono dari Indonesia. Indonesia menyediakan tempat dan gedung untuk sekretariat ASEAN di Jakarta.
2. Peran Kontingen Garuda Indonesia Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaian dunia dibuktikan dengan mengirimkan kontingen Garuda sampai empat belas kali ke luar negeri. Kontingen ini dikirim ke negara yang sedang mengalami konflik. Kontingen Garuda berada di bawah komando PBB.
3. Peran dalam KTT Non-Blok Republik Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok tidak pernah absen setiap diselenggarakan KTT yang sudah dua belas kali, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Non Blok kesepuluh pada tahun 1992.

4. Peranan dalam Organisasi Konferensi Islam Walaupun RI bukan Negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dapat diterima menjadi anggota OKI dan banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan umat Islam.

Demikian politik luar negeri, karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut, sehingga negara kerap kali melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain, yang disebut diplomasi. Kajian tentang diplomasi berkembang pesat pasca konvensi Wina tahun 1961 yang menjelaskan bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tidaklah untuk keuntungan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili Negara-Negara (Rendi Prayuda, 2019).

Diplomasi kerap kali dikaitkan dengan perundingan maupun perjanjian antara dua pihak maupun lebih. Hal tersebut benar adanya mengingat diplomasi merupakan urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain melalui wakil negaranya masing-masing sebagai perantara (Kusumasomantri, 2015). Sejatinnya diplomasi merupakan sistem komunikasi dalam masyarakat internasional yang bertujuan untuk membuat suatu persetujuan atau kesepakatan antarnegara. Dalam dunia politik sebagai proses komunikasi antaraktor internasional guna mencari penyelesaian atas konflik yang dihadapi dengan cara bernegosiasi (Rana, 2018).

Diplomasi sendiri memiliki arti instrument utama untuk kebijakan luar negeri, yang mana memiliki tujuan dan strategi yang lebih luas dalam memandu interaksi suatu negara dengan seluruh dunia. Indonesia memiliki peran sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan adanya hal ini Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kemanusiaan dan kebencanaan melalui politik luar negerinya, meliputi pemberi bantuan dan penerima manfaat. Indonesia memiliki banyak peran dalam memberi bantuan, sebagai contohnya mari kita ambil kasus peran Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State of Myanmar. Indonesia menganggap kasus ini sebagai krisis kemanusiaan yang sangat penting untuk diperhatikan secara serius. Indonesia juga pernah melakukan diplomasi bencana terhadap bencana Haiyuan, hal ini menjadi pembelajaran untuk ASEAN sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi.

Sejatinya diplomasi terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan cakupan topik yang akan didiplomasikan itu sendiri, yang pertama adalah diplomasi makro. Diplomasi makro pada umumnya lebih banyak menyangkut hal-hal mengenai propaganda, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Sedangkan yang kedua, diplomasi mikro, merupakan diplomasi yang lebih banyak menjual kepentingan nasional negaranya melalui budaya, seperti kesenian dan olah raga (Rana, 2018).

Pada tahun 2020, Indonesia dan beberapa negara besar di dunia telah menghadapi bencana kesehatan secara skala besar yang bisa kita sebut dengan pandemic covid-19. Dengan covid-19 yang terus kian menyebar muncul beberapa penilaian bahwa Indonesia dinilai sudah siap dalam menghadapi wabah tersebut, yang mana hal ini tercatat oleh Global Health Security yang disusun langsung oleh The Economist Intelligence Unit. Penentuan suatu pandemic terdiri dari tiga dasar antara lain : munculnya penyakit baru pada satu populasi, menjangkit manusia dan menimbulkan penyakit berbahaya, dan yang terakhir dapat menyebar dengan mudah dan lestari antar manusia. Adapun kebijakan Indonesia untuk diterapkan sebagai upaya dalam menaggulangi covid-19, kebijakan tersebut mayoritas diberlakukan seperti negara-negara lain yang terdampak covid-19 seperti China dan negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan tanggung jawab penuh dari pemerintah seperti misalnya, pengurangan mobilisasi massa, determinasi politik, menyesuaikan kebijakan dengan tepat, serta mengurangi dampak ekonomi dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya. Kebijakan yang paling umum diterapkan oleh Indonesia dalam memperkecil penyebaran virus corona yaitu dengan mengeluarkan kebijakan *work from home*, *lockdown*, pembatasan sosial berskala besar (psbb), *new normal*, dan pemberian vaksin dari pemerintah dimana kebijakan-kebijakan ini juga diterapkan di berbagai negara lain. Adapun dari kebijakan tersebut lahir beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga bisa meredakan pandemic covid-19, karena pada dasarnya kebijakan akan berhasil jika implementasi protokol kesehatan diterapkan dan didukung dengan kepatuhan masyarakatnya.

Dengan adanya wabah virus corona yang kabarnya sangat mengguncang dunia, Indonesia menyatakan pada awal bulan Maret 2020 menjadi salah satu negara yang secara resmi mengumumkan ada dua kasus yang terjangkit virus ini, yang mana berita tersebut

diumumkan oleh Presiden Indonesia secara langsung yaitu Joko Widodo. Berita yang dilontarkan Jokowi menyebutkan bahwa virus corona bisa menyebar di Indonesia dengan dugaan kontak hubungan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia pada saat itu, dinilai warga Jepang tersebut membawa virus corona. Dimana WNI yang terkena penyebaran virus corona pertama kali, diduga sedang berada di sebuah restoran sekitar kawasan Jakarta. Dilansir juga warga Jepang yang sempat datang ke Indonesia itu sudah terdeteksi di Malaysia pada saat meninggalkan Indonesia, hal ini yang menyebabkan Indonesia masuk kedalam peta penyebaran virus corona dengan jenis baru yang bisa kita kenal sebagai covid-19, didalam berita yang banyak beredar pun Indonesia masuk kedalam titik merah atas penyebaran virus ini. Dengan tingkat kematian nol, sembuh dari virus corona juga nihil serta yang masih terlihat dampaknya ada dua kasus tersebut. Dari Indonesia yang sudah mulai terkena virus corona ini hal tersebut menjadikan sebuah pertambahan untuk skala penyebaran covid-19 di dunia.

Sempat Indonesia memberikan spekulasi bahwa negaranya tidak terkena dampak dari virus corona tersebut dinyatakan juga bahwa Indonesia masih kebal dari serangan virus, bagaimana bisa Indonesia masih terbebas dari covid-19 sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Thailand saja sudah terkena penyebaran virus tersebut. Akan tetapi pada saat itu Indonesia selalu menyatakan nol dari penyebaran virus corona, namun hal ini telah mematahkan spekulasi tersebut dikarenakan Indonesia saat ini sudah terkena covid-19 (Pramudiarja, 2020). Kabar Indonesia tidak terkena virus covid-19 sempat menjadi perbincangan dunia yang dinilai tidak ilmiah, seperti berita-berita yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Hubei, China. Kemudian virus ini mendapatkan perhatian dari WHO yang memiliki tugas sebagai organisasi kesehatan dunia, virus ini juga menyebabkan penyakit dan juga timbul sebagai wabah. Dengan sudah masuknya covid-19 ke Indonesia ini sempat Indonesia mengumumkan bahwa negaranya masih nol dalam penyebaran virus ini, kementerian kesehatan pun dengan lantang menegaskan belum ada kasus covid-19. Hal ini dipenuhi kontroversi beberapa pernyataan seperti misalnya Indonesia bisa terbebas dari penyebaran covid-19 karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki iklim tropis dan juga memiliki kekebalan tubuh yang cukup kuat. Dijelaskan juga kontroversi lain mengenai Indonesia terbebas dari covid-19 dengan begitu kuatnya *antibody* di tubuh orang Indonesia, dengan pendapat lain bahwa Indonesia itu kebal dengan

virus termasuk flu Singapura, mers dan lain-lain. Kemenkes juga mempertegas dengan Indonesia yang berada di negara tropis dengan tingkat kelembapan yang tinggi ujar kemenkes Indonesia dan juga Indonesia yang terbiasa dengan udara kotor serta tumbuhnya jamur dimana-mana, akan tetapi hal-hal semacam ini telah patah pada saat Indonesia mengumumkan jika Indonesia terkena covid-19. Setelah dikonfirmasi hal-hal semacam itu hanya sebatas dugaan yang masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara luas, dugaan tersebut juga muncul dari kepala bidang media dan opini publik bahwa Indonesia tidak terkena virus corona karena keadaan daya tahan tubuh orang Indonesia dinilai kuat dalam melawan penyebaran covid-19, akan tetapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu. Wabah ini bisa menjadi ancaman kesehatan dunia dan nasional, negara harus berani mengambil langkah demi pertahanan jika pandemic ini akan menjadi sebuah ancaman teroris global. Oleh karena itu negara harus bisa menyiapkan perkembangan teknologi kesehatan jika tidak mau disalahgunakan oleh para teroris dengan bioterorisme. (kominfo, 2017)

Wuhan menjadi awal penyebaran virus corona ini yang mana hal tersebut menjadi perhatian dunia diseluruh penjuru internasional, dengan tingkat korban yang tercatat sudah ada 13 negara yang terkena penyebaran covid-19 dan tercatat juga banyaknya korban virus corona 80.000 (data bisa saja berubah dengan terus berkembangnya virus) kasus namun tingkat kematian dari virus ini baru ditemukan di negara asalnya yaitu China, dimana virus ini diumumkan pertama kali oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019 (rizal, 2020). Dengan penyebaran pertama mulai dari pasar hewan atau pasar makanan laut China Selatan-Wuhan, virus corona mulai terdeteksi menurut pusat sains dan teknik sistem. Dalam kasus ini jika diukur dari presentasinya kematian akibat covid mencapai 90% dan yang sudah tercatat korban meninggal sejauh ini sudah mencapai 10 negara lainnya selain China.

Adanya penyebaran wabah virus corona di dunia dan khususnya di Indonesia, ada beberapa bidang yang terdampak dari covid-19 ini. Bidang yang sangat terasa dampaknya antara lain seperti industry pariwisata, wajar saja pariwisata menjadi salah satu bidang yang terkena dampak paparan virus corona. Pasalnya beberapa negara termasuk Indonesia memberlakukan sistem *lockdown* sehingga secara berhenti bisnis pariwisata terganggu demi upaya mencegah penyebaran covid-19. Selanjutnya bidang yang terkena dampak dari corona adalah industri penerbangan, dengan sangat terpaksa maskapai penerbangan harus

mengurangi bahkan memberhentikan penerbangan internasional maupun domestik. Namun dilansir dari sumber berita yang beredar walaupun dengan mengeluarkan kebijakan mengurangi penerbangan pihak Indonesia tidak akan memberhentikan seluruh karyawan agar tidak berdampak bagi mereka juga. Dampak yang sangat amat dirasakan oleh seluruh masyarakat luas adalah bidang ekonomi, sosial dan bidang UMKM. Dikarenakan para pembisnis dan pedagang kecil dimasa pandemik ini sangat kesulitan, tercatat omset umkm sudah surut sejak Februari. Dengan adanya umkm yang surut banyak karyawan secara terpaksa dirumahkan hal ini menyebabkan ketidak seimbangan perekonomian untuk rakyat menengah kebawah dan berdampak sosial bagi masyarakat yang sulit dalam bidang ekonominya. Dampak yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona ini sangat menjadi ancaman bagi semua negara dan di Indonesia hal tersebut menjadi ancaman karena, secara tidak langsung pandemic ini mengakibatkan lemahnya permintaan dan layanan ekspor maupun impor. Indonesia dapat menyikapi ancaman ini dengan cara mengupayakan dampak negatif jangka panjang untuk perlambatan ekonomi global, memberikan paket stimulus fiskal, dan juga memberlakukan kebijakan moneter yang mana melibatkan bank sentral dengan memperhatikan aliran kredit tersalurkan secara baik ke sektor ekonomi riil. (covid-19, 2020)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan paper ini yaitu “Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani covid-19?”

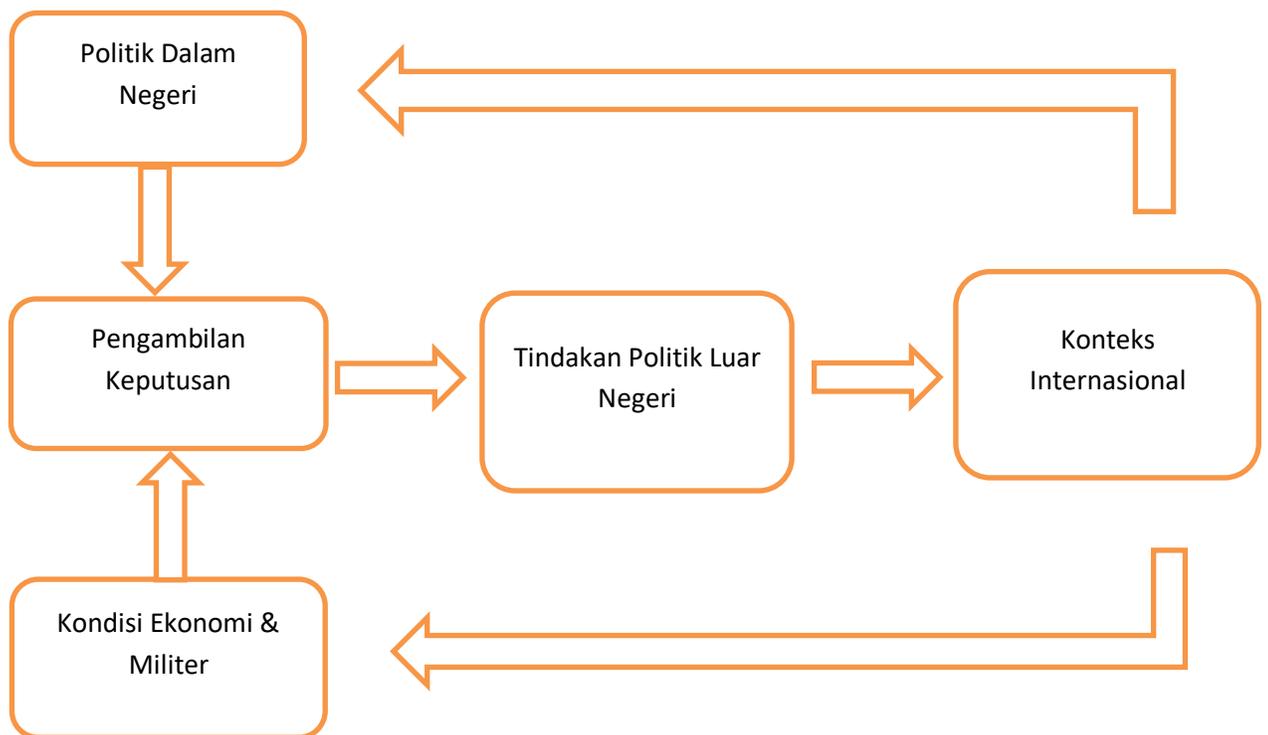
C. LANDASAN TEORI

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin)

Perlu kita ketahui terlebih dahulu arti dari politik luar negeri menurut William D. Coplin, politik luar negeri berisi beberapa aktivitas yang bisa dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu : kebijakan umum, keputusan-keputusan administrative, dan

keputusan-keputusan kritis. Politik Luar Negeri juga bersifat umum yang mana terdiri dari serangkaian keputusan yang satu dengan yang lain hanya terkait secara tidak langsung. Dengan ini penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri oleh Coplin dalam menjelaskan pertimbangan diplomasi Indonesia dalam penanganan covid-19 sebagai isu global health, Willian D.Coplin juga telah menggambarkan sebuah model sebagai berikut :



Menurut William D. Coplin kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang akan mempengaruhi para pengambilan keputusan luar negeri yaitu : kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan keamanan, dan konteks internasional.

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Teori Coplin politik dalam negeri suatu negara memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan suatu negara. William D. Coplin juga memberikan suatu istilah **policy influencers** dimana hal ini mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan. Di Indonesia pemimpin negara (Presiden, Perdana Menteri) bisa disebut sebagai aktor yang dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilihat dari sistem pemerintahan dalam suatu negara pada saat mengalami kesulitan dalam menghadapi dampak dari efek berkelanjutan wabah pandemic virus global ini. Bahkan ada beberapa pendapat dari berbagai pejabat pemerintah yang saling bertolak belakang dalam mengemukakan pendapatnya. Hubungan kekuasaan pemerintah melalui statement dari Presiden terkait politik dalam negrinya untuk menangani wabah ini. Presiden menyampaikan beberapa statement melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor sebagai berikut : pertama memberi evaluasi penerapan psbb dengan harapan dilakukan secara efektif, kedua dengan adanya pemberlakuan psbb pemerintah harus bisa mengukur target dengan contoh pengujian tes *PCR* yang mana langkah ini dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta mengontrol orang-orang yang berkontak langsung setiap harinya, dan yang terakhir presiden memberikan statement untuk membuat hotline pengaduan sehingga tidak ditemukan suatu penyimpangan hal tersebut bisa dilakukan menggunakan media massa untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakatnya.

Pada saat covid-19 terus menyebar dengan skala besar dari awal kemunculan hingga saat ini, Indonesia sudah memberlakukan beberapa kebijakan untuk menangani pandemic seperti : dianjurkan untuk tetap dirumah saja, pembatasan sosial, pembatasan fisik untuk menghindari penularan dengan kontak langsung, menggunakan perlindungan diri (masker, APD, dll), selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu memperhatikan kebersihan badan dan cuci tangan, dilarang berkumpul dengan jumlah banyak hingga terciptanya kebijakan dimana pemerintah harus bisa memberlakukan kondisi *new normal*.

2. Kondisi Ekonomi dan Keamanan

Di dalam proses politik luar negeri suatu negara harus memiliki kemampuan serta kesediaan dalam menciptakan komponen yang mana akan diperlukan untuk

menopang politik luar negerinya. Dimana keputusan luar negeri harus mampu menyeimbangkan faktor ekonomi atau keamanan, dan juga memperhatikan kelemahan negara dalam penyusunan politik luar negeri. Pada keadaan yang sulit ini karena pandemic Indonesia mengalami masa yang susah dalam hal perekonomian. Indonesia juga sangat mengedepankan kekuasaan dan sektor ekonominya dibandingkan kesehatan masyarakatnya secara global, Indonesia dinilai lalai pada saat terus-menerus menarik para wisatawan bertepatan dengan covid-19 yang terus menyebar dengan pesat dan juga terlambatnya dalam memberlakukan pembatasan sosial hal tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam suatu negara. Dengan keluarnya kebijakan seperti *PSBB*, dan *Lock Down* bahkan sampai beberapa perkantoran mengeluarkan para pekerja atau PHK berskala besar hal tersebut menjadi suatu tamparan untuk laju ekonomi Indonesia secara jangka pendek. Dikarenakan kota dengan kasus terbanyak virus corona ialah Jakarta selaku Ibu Kota Indonesia, yang mana merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan Indonesia. Pada kondisi ini sangat diharapkan untuk Kementrian Ketenagakerjaan perlu menyusun pola komunikasi digital, sehingga penyebaran wabah dapat lebih dikendalikan dan aktivitas ekonomi segera pulih seperti sedia kala.

3. Konteks Internasional

Menurut William D. Coplin ada tiga elemen penting untuk membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, antara lain : geografis, ekonomis dan juga politik. Setiap negara memiliki lingkungan internasional yang terdiri dari lokasi kedudukannya, hal ini dapat dikaitkan dengan negara-negara lain dalam sistem itu serta hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara satu dengan yang lainnya. Pada saat pandemik ini ada berbagai kerjasama internasional untuk percepatan penanggulangan covid-19, dengan adanya bantuan seperti peralatan kesehatan, obat-obatan, dan test kit dari mancanegara hal tersebut sangat membantu upaya menanggulangi wabah covid-19. UNICEF juga sudah menyampaikan dukungannya, adapun bantuan lain dari PMI dan juga ada konsistensi serta bantuan lain yang akan terlaksanakan dari beberapa organisasi internasional. Komitmen bantuan ini bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah Indonesia, baik

dari pemerintah-pemerintah negara sahabat maupun pihak-pihak non-pemerintah dan organisasi internasional dan juga akan terus-menerus secara bertahap difasilitasi oleh lintas kementerian atau lembaga. Dukungan ini tersampaikan dengan baik kepada gugus tugas percepatan penanganan covid-19, hal tersebut hasil kerjasama dengan BNPB untuk disalurkan kepada pihak fasilitas kesehatan dan masyarakat umum di seluruh tanah air.

D. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis kemudian dapat menarik sebuah hipotesa.

Diplomasi Indonesia dalam penanganan covid-19 dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain:

1. Dalam konteks internasional, penetapan covid-19 sebagai pandemic global oleh WHO mengharuskan Indonesia mengikuti berbagai kebijakan WHO dalam kerjasama global mengatasi pandemic covid-19, seperti sistem kebijakan *lockdown*, kebijakan menjaga jarak sosial atau *social distancing* terhadap masyarakat, serta kebijakan pemberian vaksin bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia mengupayakan percepatan ketersediaan vaksin untuk menekan jumlah angka penyebaran covid-19 dan mengembalikan keadaan menjadi normal seperti sebelumnya.
2. Dalam kondisi ekonomi dan keamanan dalam negeri dimana Indonesia menetapkan covid-19 sebagai isu keamanan yang bersifat non militer, dan kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak efek negatif pandemik covid-19. Pada level negara baik itu negara maju ataupun negara berkembang dampak yang signifikan terlihat pada keamanan dan ekonomi dari negara tersebut. Pada segi ekonomi, covid-19 telah mengakibatkan penurunan pendapatan di berbagai sektor, dan mengakibatkan penurunan jumlah

produksi sehingga beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan PHK pada karyawannya, sehingga jumlah angka pengangguran semakin meningkat.

3. Kondisi politik dalam negeri dimana angka pertambahan covid-19 semakin meningkat sehingga menciptakan kekhawatiran dan kepanikan masyarakat, pemerintah dinilai kurang cepat dan efektif dalam menangani penyebaran, khususnya presiden dan menteri kesehatan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik berupa pemberian bantuan maupun kebijakan protokol kesehatan dinilai kurang tepat sasaran, dan menimbulkan masalah baru.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan proposal skripsi ini diharapkan bisa menjawab secara relevan dari rumusan masalah tentang berbagai pertimbangan diplomasi Indonesia dalam penanganan covid-19, tujuan lainnya yaitu guna untuk memenuhi tugas akhir dalam studi hubungan internasional.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dimulai dari Februari 2020 saat merebaknya isu covid-19 hingga Februari 2021 saat Indonesia mulai melakukan vaksinasi covid-19, kemudian pemerintah Indonesia mengumumkan pengadaan vaksin covid-19 telah diproduksi baik dalam negeri maupun luar negeri.

G. BATASAN PENELITIAN

Pada penulisan ini, penelitiannya mempunyai jangkauan pada tahun 2019 akhir hingga 2020 yang mana isu ini mulai sejak penyebarannya di Wuhan, Cina sampai saat ini.

H. METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data menggunakan penelitian kuantitatif, yang mana data tersebut menggunakan sumber buku mengenai praktik di ilmu hubungan internasional, serta penulis juga menggunakan sumber dari akses internet yang dibaca.

2. Metode Menyeleksi dan Mengklarifikasi Data

Pertimbangan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah covid-19 adalah sebuah upaya dari isu negara.

3. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dimana metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara aktual, rinci dan juga melukiskan gejala pada saat kondisi itu berlangsung. Metode ini juga menggambarkan analitis, melakukan klarifikasi serta menitikberatkan observasi secara ilmiah.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab antara lain :

Bab I Tertulis mengenai bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah tentang pertimbangan diplomasi Indonesia dalam penanganan covid-19 dan penyebaran covid-19, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang penjelasan Indonesia dan diplomasi bencana.

Bab III Penulis menjelaskan munculnya covid-19 sebagai pandemic ditingkat internasional serta dampak covid-19 bagi Indonesia yang terdiri dari dua hal yaitu saat mengevakuasi korban dan penyebaran wabah itu sendiri.

BAB IV Penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan diplomasi Indonesia dalam menangani covid-19

Bab V Bab ini merupakan kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV